



Wawasan Nusantara sebagai Prinsip Pembangunan Hukum Nasional: Studi Konseptual dan Implementasi

Tasya Fais Prabowo^{1*}, Viora Hustika², Nuryah³

^{1,2,3} Fakultas Kebidanan Institut Citra Internasional, Indonesia

*Corresponding author: tasyafaisprabowo@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 02-06-2025

Direvisi: 15-06-2025

Diterbitkan: 10-07-2025

Abstrk: Wawasan Nusantara merupakan konsep fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang mengintegrasikan aspek geografis, demografis, dan ideologis dalam satu kesatuan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam memperkuat identitas nasional serta efektivitas internalisasinya melalui sistem pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, menggunakan studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam terhadap stakeholder pendidikan dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Wawasan Nusantara masih menghadapi tantangan signifikan di era globalisasi, terutama dalam menghadapi penetrasi budaya asing dan fragmentasi sosial. Internalisasi melalui pendidikan menunjukkan efektivitas yang bervariasi, dengan keberhasilan lebih tinggi pada jenjang pendidikan dasar dibandingkan pendidikan tinggi. Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi kurikulum pendidikan Wawasan Nusantara yang lebih kontekstual, pengembangan media pembelajaran interaktif, dan penguatan peran guru sebagai agen transmisi nilai-nilai kebangsaan. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila untuk menjaga keutuhan NKRI.

Kata Kunci: Wawasan Nusantara, Identitas Nasional, Pendidikan Karakter

Abstract: *Wawasan Nusantara (Indonesian Archipelagic Outlook) represents a fundamental concept in Indonesian national and state life that integrates geographical, demographic, and ideological aspects within a unified territorial framework. This research aims to analyze the implementation of Wawasan Nusantara values in strengthening national identity and the effectiveness of its internalization through the national education system. The research methodology employs a qualitative approach with descriptive analysis techniques, utilizing literature studies, observations, and in-depth interviews with education stakeholders and community leaders. Research findings indicate that the implementation of Wawasan Nusantara still faces significant challenges in the globalization era, particularly in confronting foreign cultural penetration and social fragmentation. Internalization through education shows varying effectiveness, with higher success rates at elementary education levels compared to higher education. This research recommends revitalizing Wawasan Nusantara education curriculum to be more contextual, developing interactive learning media, and strengthening teachers' roles as agents of national values transmission. The implications of this research contribute to developing character education strategies based on local wisdom and Pancasila values to maintain the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Wawasan Nusantara, National Identity, Character Education*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau menghadapi kompleksitas hukum yang signifikan dalam implementasi konsep Wawasan Nusantara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan. Persoalan hukum konkrit muncul ketika terjadi inkonsistensi penerapan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara dalam berbagai regulasi sektoral, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Inkonsistensi ini terlihat jelas dalam pengelolaan wilayah perbatasan, di mana masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan kedaulatan teritorial berdasarkan konsep Wawasan Nusantara.¹

Problematika hukum semakin kompleks dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang membatalkan frasa "laut teritorial" dalam Pasal 27 huruf j UU Pemerintahan Daerah, yang berimplikasi pada ketidakjelasan batas yurisdiksi pengelolaan wilayah laut dalam kerangka Wawasan Nusantara. Hal ini menimbulkan persoalan praktis dalam implementasi Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, di mana konsep archipelagic state principle yang menjadi dasar Wawasan Nusantara tidak terintegrasi secara koheren dengan regulasi turunannya. Konflik norma ini juga teridentifikasi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dalam praktiknya menimbulkan ketegangan antara kepentingan konservasi maritim dengan eksploitasi sumber daya alam laut.²

Permasalahan hukum tersebut diperparah oleh lemahnya internalisasi konsep Wawasan Nusantara dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meskipun Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas mengamanatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan wajib yang mencakup materi Wawasan Nusantara, implementasinya dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan ketidakselarasan substansial. Kurikulum yang berlaku saat ini belum secara komprehensif mengintegrasikan pemahaman geopolitik Indonesia yang berlandaskan Wawasan Nusantara, sehingga berpotensi menghasilkan generasi yang lemah dalam kesadaran bela negara.

Tantangan kontemporer semakin kompleks dengan adanya penetrasi ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Nusantara. Fenomena radikalisme dan separatisme yang masih muncul di berbagai daerah menunjukkan kegagalan sistemik dalam internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tahun 2023 mencatat masih adanya 124 kasus terkait paham radikal yang tersebar di 17 provinsi, yang mengindikasikan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep persatuan dalam kerangka Wawasan Nusantara. Kondisi ini diperburuk oleh arus globalisasi dan digitalisasi yang membawa nilai-nilai asing yang tidak selalu sejalan dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, problematika implementasi Wawasan Nusantara tercermin dari hasil survei Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud tahun 2022 yang menunjukkan bahwa hanya 62% siswa SMA yang memiliki pemahaman baik tentang konsep geopolitik Indonesia. Angka ini menurun signifikan dibandingkan dengan data tahun 2018 yang mencapai 78%, mengindikasikan adanya degradasi pemahaman generasi muda terhadap Wawasan

¹ Yosef Sitepu, John Pieris, and Wiwik Sri Widiarty, "Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Pemeriksaan Kapal-Kapal Niaga Yang Menghambat Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 6 (June 18, 2025), <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v5i6.32176>.

² Melaniati Suharni and Yohanes Arman, "UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (July 14, 2023): 91–105, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.455>.

Nusantara. Fenomena ini sejalan dengan maraknya gerakan disintegrasi yang memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan narasi anti-NKRI, khususnya di kalangan generasi milenial dan Gen-Z.

Aspek geopolitik Wawasan Nusantara juga menghadapi tantangan eksternal berupa dinamika geopolitik regional yang semakin kompleks. Sengketa wilayah di Laut China Selatan, klaim sepihak beberapa negara atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan intensifikasi aktivitas kapal asing di perairan Indonesia menunjukkan urgensi penguatan pemahaman dan implementasi Wawasan Nusantara. Kondisi ini memerlukan respons yang tidak hanya bersifat diplomatik dan militer, tetapi juga melalui penguatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kedaulatan teritorial berdasarkan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara.³

Era Society 5.0 dan revolusi industri 4.0 juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi Wawasan Nusantara.⁴ Transformasi digital yang masif telah mengubah pola interaksi sosial dan budaya masyarakat, yang berpotensi mengikis nilai-nilai lokalitas dan nasionalitas. Platform media sosial dan teknologi informasi yang tidak terkendali dapat menjadi medium penetrasi budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptif dalam internalisasi Wawasan Nusantara yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi sambil tetap mempertahankan jati diri bangsa.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan hukum, sosial, dan pendidikan tersebut, penelitian tentang Wawasan Nusantara menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi gap implementasi dalam kerangka hukum yang ada, tetapi juga merumuskan strategi komprehensif untuk revitalisasi Wawasan Nusantara dalam menghadapi tantangan kontemporer. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat posisi strategis Indonesia di persimpangan geopolitik global yang memerlukan fondasi ideologis yang kuat untuk menjaga keutuhan NKRI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis yang mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait Wawasan Nusantara dengan kajian empiris mengenai implementasinya dalam masyarakat dan sistem pendidikan. Sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan (UD 1945, UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara, UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan regulasi terkait lainnya), putusan pengadilan, serta hasil wawancara mendalam dengan stakeholder pendidikan, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat; sedangkan data sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan pemerintah terkait Wawasan Nusantara.⁵ Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis aspek normatif, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur kepada 30 responden yang terdiri dari akademisi hukum, guru pendidikan kewarganegaraan, dan aparat pemerintah, serta observasi partisipatif terhadap implementasi pembelajaran Wawasan Nusantara di 10 sekolah sampel. Metode analisis data menggunakan teknik analisis konten kualitatif dengan pendekatan

³ Samugyo Ibnu Redjo and Hasim As'ari, "Pengelolaan Pemerintah Dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5, no. 2 (November 14, 2017), <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.445>.

⁴ Jadnika Dwi Rakhmawan Amrullah et al., "Efektivitas Peran Kurikulum Merdeka Terhadap Tantangan Revolusi Industri 4.0 Bagi Generasi Alpha," *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 4 (October 17, 2024): 1313–28, <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.754>.

⁵ Sarlina Saragih, "Meningkatkan Wawasan Nusantara Pada Kalangan Milenial," *Ganesha Civic Education Journal* 5, no. 2 (October 10, 2023): 46–51, <https://doi.org/10.23887/gancej.v5i2.4910>.

hermeneutika hukum untuk menginterpretasi makna norma-norma hukum, analisis gap untuk mengidentifikasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi Wawasan Nusantara, serta triangulasi data untuk memvalidasi temuan dari berbagai sumber guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan akurat mengenai efektivitas implementasi nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam penguatan identitas nasional dan sistem pendidikan karakter.

PEMBAHASAN

Implementasi Nilai-Nilai Wawasan Nusantara dalam Memperkuat Identitas Nasional dan Persatuan Bangsa Indonesia di Era Globalisasi dan Digitalisasi

Implementasi nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam konteks penguatan identitas nasional dan persatuan bangsa Indonesia menghadapi kompleksitas yang signifikan di era globalisasi dan digitalisasi. Konsep Wawasan Nusantara yang dirumuskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam praktiknya mengalami tantangan substansial ketika berhadapan dengan arus globalisasi yang membawa nilai-nilai universal yang tidak selalu sejalan dengan karakteristik lokal Indonesia. Implementasi ini harus dipahami dalam kerangka dialektika antara pelestarian nilai-nilai tradisional dengan adaptasi terhadap dinamika global yang tidak dapat dihindari.⁶

Dalam dimensi geografis, implementasi Wawasan Nusantara sebagai konsep archipelagic state menghadapi tantangan konkret berupa penetrasi budaya asing melalui jalur teknologi informasi yang melampaui batas-batas teritorial konvensional. Era digitalisasi telah mengubah konsep kedaulatan dari yang semula bersifat teritorial menjadi lebih kompleks dengan adanya cyberspace yang tidak mengenal batas geografis. Platform digital seperti media sosial, streaming service, dan aplikasi komunikasi global telah menjadi medium penetrasi nilai-nilai asing yang berpotensi mengikis identitas nasional yang dibangun atas fondasi Wawasan Nusantara. Fenomena ini terlihat jelas dalam pergeseran pola konsumsi budaya masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, yang cenderung lebih mengapresiasi produk budaya asing dibandingkan dengan budaya lokal yang seharusnya menjadi manifestasi dari nilai-nilai Wawasan Nusantara.

Implementasi nilai demografi dalam Wawasan Nusantara juga mengalami transformasi signifikan akibat globalisasi dan digitalisasi.⁷ Konsep "Bhinneka Tunggal Ika" yang menjadi pilar utama persatuan bangsa dalam kerangka Wawasan Nusantara menghadapi ujian nyata ketika berhadapan dengan fragmentasi sosial yang dipicu oleh algoritma media sosial yang cenderung menciptakan echo chamber dan filter bubble. Algoritma yang didesain untuk memberikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna justru berpotensi memperkuat segregasi sosial dan memperdalam polarisasi politik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Implementasi Wawasan Nusantara dalam konteks ini memerlukan pendekatan yang lebih sophisticated dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah belah.

Aspek ideologis Wawasan Nusantara menghadapi tantangan paling fundamental dalam era globalisasi dan digitalisasi. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis Wawasan Nusantara harus berkompetisi dengan ideologi-ideologi transnasional yang disebarkan melalui jaringan digital global. Implementasi nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia mengalami degradasi yang signifikan, terutama dalam hal gotong royong, toleransi,

⁶ Mohammad Ridwan, "Dinamika Pendidikan Islam: Antara Kearifan Tradisi, Perubahan Transisi, Dan Transformasi Modernisasi," *HASBUNA: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (November 24, 2023): 337–50, <https://doi.org/10.70143/hasbuna.v3i1.207>.

⁷ Arina Romarina, "ECONOMIC RESILIENCE PADA INDUSTRI KREATIF GUNAMENHADAPI GLOBALISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL," *JURNAL ILMU SOSIAL* 15, no. 1 (March 30, 2016): 35–52, <https://doi.org/10.14710/jis.15.1.2016.35-52>.

dan semangat kebangsaan. Globalisasi ekonomi yang mengutamakan individualisme dan kompetisi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai kolektivisme yang menjadi karakteristik Wawasan Nusantara. Digitalisasi juga telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat dari yang semula bersifat komunal menjadi lebih individual dan virtual, yang berimplikasi pada melemahnya ikatan sosial yang menjadi fondasi persatuan bangsa.

Dalam konteks implementasi melalui institusi negara, Wawasan Nusantara menghadapi tantangan berupa inkonsistensi kebijakan yang disebabkan oleh tekanan globalisasi ekonomi dan politik. Kebijakan liberalisasi ekonomi yang diadopsi pemerintah seringkali bertentangan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang menjadi bagian integral dari Wawasan Nusantara. Implementasi otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah juga berpotensi menimbulkan ego kedaerahan yang dapat mengancam persatuan nasional jika tidak dikelola dengan baik dalam kerangka Wawasan Nusantara. Era digitalisasi birokrasi yang mengutamakan efisiensi dan transparansi memang memberikan manfaat dalam pelayanan publik, namun juga berpotensi mengabaikan aspek-aspek sosial budaya lokal yang menjadi karakteristik Wawasan Nusantara.⁸

Implementasi Wawasan Nusantara dalam sektor pendidikan menghadapi dilema antara kebutuhan menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif secara global dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan nasional. Kurikulum pendidikan yang berorientasi pada standar internasional seringkali mengabaikan muatan lokal yang menjadi manifestasi dari Wawasan Nusantara. Digitalisasi pendidikan yang dipercepat akibat pandemi COVID-19 juga telah mengubah pola pembelajaran yang semula menekankan interaksi sosial langsung menjadi lebih individual dan virtual. Hal ini berimplikasi pada melemahnya proses sosialisasi nilai-nilai Wawasan Nusantara yang memerlukan interaksi sosial yang intensif untuk pembentukan karakter.

Tantangan implementasi juga muncul dari aspek generasional, di mana generasi digital native memiliki pola pikir dan nilai yang berbeda dengan generasi sebelumnya.⁹ Generasi milenial dan Gen-Z yang tumbuh dalam era globalisasi dan digitalisasi cenderung memiliki orientasi yang lebih global dan individual, yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai kolektif Wawasan Nusantara. Implementasi nilai-nilai ini memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan adaptif yang mampu menyesuaikan dengan karakteristik generasi digital tanpa kehilangan esensi dari Wawasan Nusantara itu sendiri.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi Wawasan Nusantara dalam era globalisasi dan digitalisasi juga membuka peluang baru untuk penguatan identitas nasional.¹⁰ Teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai medium untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Indonesia ke tingkat global, sekaligus memperkuat rasa kebanggaan nasional di kalangan masyarakat domestik. Platform digital juga dapat menjadi sarana untuk memfasilitasi dialog antarbudaya dan antardaerah yang dapat memperkuat persatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi yang efektif memerlukan strategi yang mampu mengoptimalkan peluang globalisasi dan digitalisasi sambil meminimalkan risiko yang dapat mengancam identitas nasional dan persatuan bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Wawasan Nusantara.

⁸ Djaka Marwasta, "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 1, no. 2 (April 11, 2016): 204, <https://doi.org/10.22146/jpkm.10607>.

⁹ Rahmita Syahfitri Siregar and Matang, "INDONESIA ERA GLOBALISASI: PERAN DAN TANTANGAN GENERASI KEDUA DIGITAL NATIVE," *AT-TAWASUL* 2, no. 2 (February 28, 2023): 101–9, <https://doi.org/10.51192/ja.v2i2.470>.

¹⁰ Nur Jannah et al., "Analisis Perkembangan Local Wisdom Di Bumi Nusantara Pada Era Disrupsi Teknologi," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 23, no. 1 (April 23, 2025): 156–67, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.1.156-167>.

Efektivitas Internalisasi Konsep Wawasan Nusantara dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk Membentuk Karakter Generasi Muda yang Berjiwa Nasionalis dan Memiliki Kesadaran Geopolitik

Efektivitas internalisasi konsep Wawasan Nusantara dalam sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan sistemik yang kompleks, terutama dalam upaya membentuk karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis dan memiliki kesadaran geopolitik yang memadai. Sistem pendidikan Indonesia yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran wajib yang mencakup materi Wawasan Nusantara, namun implementasinya dalam kurikulum operasional menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara idealitas normatif dengan realitas empiris di lapangan. Permasalahan mendasar terletak pada pendekatan pedagogis yang masih bersifat indoktrinatif dan teoritis, sehingga gagal mengembangkan pemahaman kontekstual dan aplikatif tentang relevansi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari generasi muda.

Kurikulum pendidikan yang berlaku saat ini, meskipun telah mengalami beberapa kali revisi dari Kurikulum 2013 hingga implementasi Kurikulum Merdeka, masih menunjukkan kelemahan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Wawasan Nusantara secara komprehensif dan kontekstual. Materi Wawasan Nusantara yang disajikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) cenderung bersifat hapalan dan tidak mengembangkan kemampuan analitis siswa untuk memahami dinamika geopolitik kontemporer yang dihadapi Indonesia. Pendekatan yang terlalu menekankan aspek kognitif tanpa mengembangkan dimensi afektif dan psikomotorik menyebabkan siswa memiliki pengetahuan tentang Wawasan Nusantara namun tidak internalisasi nilai-nilai tersebut dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Hal ini tercermin dari hasil evaluasi yang menunjukkan bahwa meskipun siswa dapat menjelaskan konsep Wawasan Nusantara secara teoretis, mereka kesulitan mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kehidupan nyata.¹¹

Kompetensi guru sebagai agen utama internalisasi nilai-nilai Wawasan Nusantara juga menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Mayoritas guru PPKn di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam hal pemahaman mendalam tentang dinamika geopolitik kontemporer dan kemampuan mengkontekstualisasikan materi Wawasan Nusantara dengan isu-isu aktual yang dihadapi bangsa Indonesia. Sistem pendidikan guru yang ada belum mampu menghasilkan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan mengintegrasikan teori Wawasan Nusantara dengan praktik pembelajaran yang inovatif dan engaging bagi generasi digital native. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya program pengembangan profesi berkelanjutan yang fokus pada update pengetahuan geopolitik dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa era digital.

Metode pembelajaran yang diterapkan dalam internalisasi Wawasan Nusantara masih dominan menggunakan pendekatan konvensional yang bersifat teacher-centered dan kurang interaktif. Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran PPKn belum dioptimalkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang immersive dan meaningful bagi siswa. Padahal, generasi muda saat ini memiliki karakteristik belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana mereka lebih responsif terhadap pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, dan collaborative.¹² Ketidaksesuaian antara metode pembelajaran dengan

¹¹ Faidah Yusuf et al., "PKM Pelatihan Penyusunan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Bagi Guru Sekolah Dasar Di SDN 3 Mimika," *Jurnal Panrita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 02 (May 20, 2024): 47–54, <https://doi.org/10.47435/jcs.v2i02.2803>.

¹² Dwi Suci Rahma Putri et al., "The Importance of Effective Communication in Improving the Quality of Classroom Learning Interactions between Teachers and Students," *Bulletin of Pedagogical Research* 5, no. 2 (May 9, 2025): 1–15, <https://doi.org/10.51278/bpr.v5i2.1789>.

karakteristik siswa menyebabkan rendahnya engagement dan motivasi belajar, yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak efektifnya proses internalisasi nilai-nilai Wawasan Nusantara.

Konteks sosial budaya di lingkungan sekolah dan masyarakat juga memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas internalisasi Wawasan Nusantara. Budaya sekolah yang tidak mendukung pengembangan karakter nasionalis, seperti kurangnya pembiasaan upacara bendera, perayaan hari-hari nasional, atau kegiatan ekstrakurikuler yang bernuansa kebangsaan, dapat mengurangi efektivitas pembelajaran formal di kelas. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial yang semakin individualistis dan materialistis akibat penetrasi budaya global juga menjadi counter-narrative terhadap nilai-nilai kolektif dan spiritualitas yang menjadi essence dari Wawasan Nusantara. Generasi muda seringkali mengalami konflik nilai antara yang diajarkan di sekolah dengan yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga proses internalisasi menjadi tidak optimal.

Evaluasi dan assessment yang digunakan untuk mengukur keberhasilan internalisasi Wawasan Nusantara juga masih terbatas pada aspek kognitif melalui tes tertulis yang bersifat objektif. Sistem evaluasi ini tidak mampu mengukur perubahan sikap dan perilaku siswa yang merupakan indikator utama keberhasilan internalisasi nilai. Ketiadaan instrumen evaluasi yang komprehensif untuk mengukur dimensi afektif dan psikomotorik menyebabkan guru dan sekolah tidak memiliki data akurat tentang efektivitas program internalisasi yang telah dilaksanakan. Hal ini berimplikasi pada ketidakmampuan sistem pendidikan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian strategi pembelajaran yang lebih efektif.

Faktor eksternal berupa dinamika politik dan kebijakan pendidikan yang seringkali berubah juga mempengaruhi kontinuitas dan konsistensi program internalisasi Wawasan Nusantara. Pergantian kebijakan kurikulum yang terlalu sering tanpa evaluasi yang komprehensif menyebabkan ketidakstabilan dalam implementasi program pendidikan karakter berbasis Wawasan Nusantara. Guru dan sekolah seringkali harus beradaptasi dengan perubahan kebijakan tanpa persiapan yang memadai, sehingga kualitas implementasi menjadi tidak optimal. Selain itu, politik identitas yang menguat dalam beberapa tahun terakhir juga berpotensi menimbulkan interpretasi yang bias terhadap konsep Wawasan Nusantara, yang dapat mengurangi efektivitas internalisasi nilai-nilai toleransi dan pluralisme yang menjadi bagian integral dari konsep tersebut.¹³

Tantangan teknologi dan media sosial juga memberikan dampak ambivalen terhadap efektivitas internalisasi Wawasan Nusantara. Di satu sisi, teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk generasi digital native.¹⁴ Namun di sisi lain, paparan informasi yang tidak terkontrol melalui media sosial dapat menjadi sumber disinformasi dan propaganda yang bertentangan dengan nilai-nilai Wawasan Nusantara. Generasi muda yang tidak memiliki literasi digital yang memadai rentan terhadap pengaruh konten negatif yang dapat mengikis rasa nasionalisme dan kesadaran geopolitik yang telah dibangun melalui pendidikan formal.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan tersebut, terdapat beberapa indikator positif yang menunjukkan potensi efektivitas internalisasi Wawasan Nusantara dalam sistem pendidikan. Sekolah-sekolah yang berhasil mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual menunjukkan hasil yang lebih baik dalam hal pembentukan karakter siswa yang berjiwa nasionalis. Program-program unggulan seperti gerakan literasi sekolah yang mengintegrasikan muatan kebangsaan, kegiatan ekstrakurikuler berbasis budaya

¹³ Rajiman Andrianus Sirait, "Strategi PAK Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Pendidikan," *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Katolik* 2, no. 1 (February 29, 2024): 71–82, <https://doi.org/10.61132/tritunggal.v2i1.213>.

¹⁴ Yuvita Dela Carolina, "Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Interaktif 3D Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Digital Native," *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 8, no. 1 (October 4, 2022): 10–16, <https://doi.org/10.51169/ideguru.v8i1.448>.

lokal, dan kemitraan dengan komunitas masyarakat menunjukkan dampak positif terhadap penguatan identitas nasional siswa.¹⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas internalisasi Wawasan Nusantara sangat bergantung pada kreativitas dan komitmen stakeholder pendidikan dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan karakteristik siswa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, implementasi nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam memperkuat identitas nasional dan persatuan bangsa Indonesia di era globalisasi dan digitalisasi mengalami tantangan yang bersifat multidimensional dan kompleks. Era globalisasi dan digitalisasi telah mengubah paradigma kedaulatan dari yang semula bersifat teritorial menjadi lebih kompleks dengan hadirnya cyberspace yang tidak mengenal batas geografis, sehingga penetrasi budaya asing melalui platform digital berpotensi mengikis identitas nasional yang dibangun atas fondasi Wawasan Nusantara. Fragmentasi sosial yang dipicu oleh algoritma media sosial yang menciptakan echo chamber dan filter bubble telah mengancam implementasi konsep "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai pilar persatuan bangsa. Namun demikian, globalisasi dan digitalisasi juga membuka peluang strategis untuk memperkuat identitas nasional melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai medium pelestarian dan promosi budaya Indonesia, serta memfasilitasi dialog antarbudaya yang dapat memperkuat persatuan bangsa dalam kerangka Wawasan Nusantara.

Kedua, efektivitas internalisasi konsep Wawasan Nusantara dalam sistem pendidikan nasional untuk membentuk karakter generasi muda yang berjiwa nasionalis dan memiliki kesadaran geopolitik masih menghadapi kesenjangan signifikan antara idealitas normatif dengan realitas implementasi di lapangan. Sistem pendidikan yang masih menerapkan pendekatan indoktrinatif dan teoritis gagal mengembangkan pemahaman kontekstual tentang relevansi Wawasan Nusantara dalam kehidupan generasi digital native. Keterbatasan kompetensi guru dalam mengkontekstualisasikan materi dengan isu-isu geopolitik kontemporer, dominasi metode pembelajaran konvensional yang kurang interaktif, serta sistem evaluasi yang hanya mengukur aspek kognitif tanpa dimensi afektif dan psikomotorik menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas internalisasi. Meskipun demikian, beberapa sekolah yang berhasil mengimplementasikan pendekatan pembelajaran inovatif dan kontekstual menunjukkan hasil positif dalam pembentukan karakter siswa yang berjiwa nasionalis, mengindikasikan bahwa efektivitas internalisasi Wawasan Nusantara sangat bergantung pada kreativitas dan komitmen stakeholder pendidikan dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik generasi muda era digital.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah diuraikan, terdapat dua saran strategis yang perlu diimplementasikan untuk mengoptimalkan peran Wawasan Nusantara dalam penguatan identitas nasional dan persatuan bangsa Indonesia. Pertama, pemerintah perlu melakukan revitalisasi kebijakan nasional yang mengintegrasikan nilai-nilai Wawasan Nusantara dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai instrumen penguatan identitas nasional. Revitalisasi ini mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Wawasan Nusantara untuk mengatasi inkonsistensi normatif yang selama ini menjadi hambatan implementasi, khususnya dalam penyelarasan antara UU No. 43 Tahun 2008 tentang

¹⁵ Arman Manarfa and Djamila Lasaiba, "Jejak Karakter Di Atas Budaya: Menelusuri Identitas Dalam Pendidikan," *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya* 4, no. 1 (August 6, 2024): 67–75, <https://doi.org/10.30598/Lanivol4iss1page67-75>.

Wilayah Negara dengan regulasi sektoral lainnya. Pemerintah juga perlu mengembangkan platform digital nasional yang berfungsi sebagai media edukasi dan sosialisasi nilai-nilai Wawasan Nusantara kepada masyarakat luas, sekaligus sebagai counter-narrative terhadap penetrasi budaya asing yang berpotensi mengikis identitas nasional. Platform ini harus dirancang dengan pendekatan yang interaktif dan engaging, memanfaatkan teknologi terkini seperti augmented reality dan virtual reality untuk memberikan pengalaman immersive tentang kekayaan budaya dan geografis Indonesia. Selain itu, perlu dibentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Wawasan Nusantara di era digital, serta mengembangkan strategi adaptif untuk menghadapi tantangan globalisasi yang terus berkembang.

Kedua, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu melakukan transformasi fundamental dalam sistem pendidikan nasional melalui pengembangan kurikulum Wawasan Nusantara yang kontekstual dan inovatif untuk generasi digital native. Transformasi ini harus dimulai dengan revisi kurikulum yang mengintegrasikan teknologi digital sebagai media pembelajaran interaktif, mengganti pendekatan indoktrinatif dengan metode pembelajaran berbasis problem solving dan project based learning yang memungkinkan siswa memahami relevansi Wawasan Nusantara dalam konteks kehidupan nyata. Pemerintah juga perlu menginisiasi program pelatihan komprehensif bagi guru-guru PPKn untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengkontekstualisasikan materi Wawasan Nusantara dengan isu-isu geopolitik kontemporer, serta kemampuan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran. Program ini harus berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja guru untuk memastikan sustainability dan efektivitas implementasi. Selain itu, perlu dikembangkan sistem evaluasi holistik yang tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga dimensi afektif dan psikomotorik untuk menilai keberhasilan internalisasi nilai-nilai Wawasan Nusantara dalam membentuk karakter siswa. Implementasi kedua saran ini memerlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh stakeholder, alokasi anggaran yang memadai, dan koordinasi lintas sektoral untuk memastikan sinergi dalam upaya memperkuat Wawasan Nusantara sebagai fondasi identitas nasional dan persatuan bangsa Indonesia di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Jadrina Dwi Rakhmawan, Ferry Budi Prasetya, Ayu Sayyidatina Rahma, Anjar Dwi Setyorini, Amanda Nabila Salsabila, and Vira Nuraisyah. "Efektivitas Peran Kurikulum Merdeka Terhadap Tantangan Revolusi Industri 4.0 Bagi Generasi Alpha." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 4 (October 17, 2024): 1313–28. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.754>.
- Carolina, Yuvita Dela. "Augmented Reality Sebagai Media Pembelajaran Interaktif 3D Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Digital Native." *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru* 8, no. 1 (October 4, 2022): 10–16. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v8i1.448>.
- Dwi Suci Rahma Putri, Ahmad Ilham Fadli, Dimas Raba Pramodana, Figo Rangga Bagaskara, Siti Zulaikhah, and Imam Syafe'i. "The Importance of Effective Communication in Improving the Quality of Classroom Learning Interactions between Teachers and Students." *Bulletin of Pedagogical Research* 5, no. 2 (May 9, 2025): 1–15. <https://doi.org/10.51278/bpr.v5i2.1789>.
- Jannah, Nur, Halim Soebahar, Moch. Chotib, Muhammad Noor Harisudin, and Stephen Amukune. "Analisis Perkembangan Local Wisdom Di Bumi Nusantara Pada Era Disrupsi Teknologi." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 23, no. 1 (April 23, 2025): 156–67. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.1.156-167>.
- Manarfa, Arman, and Djamilia Lasaiba. "Jejak Karakter Di Atas Budaya: Menelusuri Identitas Dalam Pendidikan." *Lani: Jurnal Kajian Ilmu Sejarah Dan Budaya* 4, no. 1 (August 6, 2024): 67–75. <https://doi.org/10.30598/Lanivol4iss1page67-75>.

- Marwasta, Djaka. "Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Di Indonesia: Lesson Learned Dari KKN-PPM UGM Di Kawasan Perbatasan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 1, no. 2 (April 11, 2016): 204. <https://doi.org/10.22146/jpkm.10607>.
- Melaniati Suharni and Yohanes Arman. "UPAYA MENGATASI TUMPANG TINDIH KEWENANGAN DI WILAYAH PERBATASAN LAUT INDONESIA." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (July 14, 2023): 91–105. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i3.455>.
- Redjo, Samugyo Ibnu, and Hasim As'ari. "Pengelolaan Pemerintah Dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia." *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5, no. 2 (November 14, 2017). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.445>.
- Ridwan, Mohammad. "Dinamika Pendidikan Islam: Antara Kearifan Tradisi, Perubahan Transisi, Dan Transformasi Modernisasi." *HASBUNA : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (November 24, 2023): 337–50. <https://doi.org/10.70143/hasbuna.v3i1.207>.
- Romarina, Arina. "ECONOMIC RESILIENCE PADA INDUSTRI KREATIF GUNAMENHADAPI GLOBALISASI DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL." *JURNAL ILMU SOSIAL* 15, no. 1 (March 30, 2016): 35–52. <https://doi.org/10.14710/jis.15.1.2016.35-52>.
- Saragih, Sarlina. "Meningkatkan Wawasan Nusantara Pada Kalangan Milenial." *Ganesha Civic Education Journal* 5, no. 2 (October 10, 2023): 46–51. <https://doi.org/10.23887/gancej.v5i2.4910>.
- Sirait, Rajiman Andrianus. "Strategi PAK Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Pendidikan." *Tri Tunggal: Jurnal Pendidikan Kristen Dan Katolik* 2, no. 1 (February 29, 2024): 71–82. <https://doi.org/10.61132/tritunggal.v2i1.213>.
- Sitepu, Yosef, John Pieris, and Wiwik Sri Widiarty. "Tumpang Tindih Kewenangan Aparat Penegak Hukum Dalam Pemeriksaan Kapal-Kapal Niaga Yang Menghambat Pertumbuhan Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Sosial Teknologi* 5, no. 6 (June 18, 2025). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32176>.
- Syahfitri Siregar, Rahmita and Matang. "INDONESIA ERA GLOBALISASI: PERAN DAN TANTANGAN GENERASI KEDUA DIGITAL NATIVE." *AT-TAWASUL* 2, no. 2 (February 28, 2023): 101–9. <https://doi.org/10.51192/ja.v2i2.470>.
- Yusuf, Faidah, Hardianto Rahman, Afdhal Fatawuri Syamsuddin, Muhammad Irfan, and Sayidiman Sayidiman. "PKM Pelatihan Penyusunan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Bagi Guru Sekolah Dasar Di SDN 3 Mimika." *Jurnal Panrita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 02 (May 20, 2024): 47–54. <https://doi.org/10.47435/jcs.v2i02.2803>.